



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 11431-11440

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Hukum Bisnis Terhadap Pelaku UMKM dalam Meningkatkan Ekonomi di Kota Medan

Amanda Putri Salsabila^{1✉}, Hafiz Yazid Tanjung², Muhammad Ariez Reiki Hsb³, Murniati Arinda Saragih⁴, Putri Rahayu⁵, Radja Janna Lubis⁶, Rewi Fitriani⁷, Rifki Maulana⁸, Rizki Ramadhan Tanjung⁹, Umi Hasanah¹⁰

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: amandaputri6847@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum bisnis terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan ekonomi di Kota Medan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya peran hukum bisnis dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi pelaku UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum bisnis yang efektif dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum bisnis memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan UMKM dan, pada gilirannya, meningkatkan perekonomian kota secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Hukum Bisnis, UMKM, Ekonomi, Kota Medan*

Abstract

This study aims to examine the role of business law in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in boosting the economy in Medan City. The background of this research is based on the importance of business law in providing protection and support for MSME actors, who are the backbone of the local economy. The research method used is a qualitative approach with data collection through in-depth interviews, observations, and document studies. The results of the study indicate that effective implementation of business law can enhance the competitiveness and sustainability of MSMEs and encourage economic growth in Medan City. The conclusion of this study is that business law plays a crucial role in supporting the development of MSMEs and, in turn, enhancing the overall economy of the city.

Keywords: *Business Law, Msmes, Economy, Medan City*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran vital dalam perekonomian Kota Medan. Sebagai tulang punggung ekonomi lokal, UMKM berkontribusi signifikan dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan (Tambunan, 2019). Namun, tantangan yang dihadapi UMKM, seperti akses keuangan, kapasitas manajerial, dan regulasi yang kompleks, seringkali menghambat pertumbuhan mereka (Rahmana & Yuniarti, 2018).

Kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa penerapan hukum bisnis yang baik dapat memberikan landasan hukum yang kokoh bagi UMKM untuk berkembang. Studi oleh Kurniawan (2017) menyatakan bahwa regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM dan investor. Demikian juga, penelitian oleh Setyawati et al. (2016) menemukan bahwa perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak usaha kecil dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis UMKM.

Meskipun banyak penelitian yang telah membahas pentingnya regulasi dan perlindungan hukum bagi UMKM, kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada analisis mendalam tentang peran spesifik hukum bisnis dalam konteks lokal di Kota Medan. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana penerapan hukum bisnis yang tepat dapat mendukung pengembangan UMKM dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kota. Misalnya, studi oleh Wang (2016) tentang regulasi bisnis di kota-kota Asia Tenggara

menunjukkan bahwa dukungan hukum yang kuat bisa mengurangi hambatan birokrasi dan korupsi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan UMKM.

Permasalahan penelitian ini difokuskan pada bagaimana hukum bisnis berperan dalam mendukung dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kota Medan. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa penerapan hukum bisnis yang efektif akan meningkatkan kinerja dan kontribusi ekonomi UMKM di Kota Medan. Penelitian sebelumnya oleh Uwuigbe dan Ajibolade (2013) menyoroti bahwa kepastian hukum dan akses ke informasi hukum merupakan faktor kunci dalam keberhasilan UMKM di berbagai wilayah.

Dalam konteks lokal Medan, penelitian ini juga mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi yang spesifik. Kota Medan, sebagai salah satu pusat ekonomi utama di Sumatera Utara, memiliki karakteristik unik yang membedakan dari kota-kota lain di Indonesia. Faktor-faktor seperti struktur pasar lokal, jaringan distribusi, dan budaya bisnis setempat semuanya mempengaruhi bagaimana hukum bisnis diterapkan dan dipatuhi (Muttakin et al., 2015).

Tujuan dari kajian artikel ini adalah untuk mengevaluasi peran hukum bisnis dalam mendukung pelaku UMKM dan mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki regulasi dan penegakan hukum guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Dengan memahami dinamika lokal dan kebutuhan spesifik UMKM di Medan, penelitian ini berharap dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam literatur hukum bisnis dengan menambahkan perspektif dari konteks kota besar di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengevaluasi peran hukum bisnis terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan ekonomi di Kota Medan. Studi literatur dipilih sebagai metode utama karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan dan sebelumnya telah dipublikasikan.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

- a. Identifikasi Sumber: Peneliti mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan, termasuk jurnal akademik, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang

berhubungan dengan UMKM, hukum bisnis, dan ekonomi Kota Medan. Sumber-sumber ini diperoleh dari database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan perpustakaan universitas.

- b. Seleksi Sumber: Setelah mengidentifikasi sejumlah sumber potensial, peneliti melakukan seleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kontribusi terhadap topik penelitian. Kriteria seleksi meliputi tahun publikasi (dalam 10 tahun terakhir), keterkaitan langsung dengan topik, dan reputasi penerbit.
- c. Ekstraksi Data: Informasi yang relevan dari setiap sumber yang terpilih diekstrak dan dikategorikan sesuai dengan tema-tema utama penelitian, seperti peran hukum bisnis, tantangan yang dihadapi UMKM, dan dampak ekonomi.

Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tahapan kodefikasi, analisis tematik, dan triangulasi. Kodefikasi yaitu informasi yang diekstrak dari literatur dikodefikasi berdasarkan tema-tema yang telah ditentukan. Analisis Tematik yaitu data yang telah dikodefikasi kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dan hubungan antar tema. Hal ini membantu dalam memahami bagaimana hukum bisnis mempengaruhi UMKM dan ekonomi di Kota Medan. Selanjutnya, triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber literatur dan mengkonfirmasi dengan data empiris dari studi sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Kepatuhan Hukum dan Regulasi

Pelaku UMKM yang memahami dan mematuhi hukum bisnis menunjukkan peningkatan signifikan dalam keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mereka. Kepatuhan ini mencakup aspek legalitas usaha, seperti perizinan, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan kepatuhan terhadap standar kualitas (Kurniawan, 2017).

Peran Penting Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang memadai memberikan rasa aman bagi pelaku UMKM, sehingga mereka lebih berani untuk melakukan inovasi dan ekspansi usaha. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Setyawati et al. (2016) yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang kuat dapat meningkatkan daya saing UMKM.

Akses terhadap Informasi Hukum

Ketersediaan informasi hukum yang mudah diakses memfasilitasi pelaku UMKM dalam memahami hak dan kewajiban mereka. Studi ini menemukan bahwa pelatihan dan sosialisasi hukum bisnis yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait membantu meningkatkan pengetahuan hukum pelaku UMKM (Uwuigbe & Ajibolade, 2013).

Adapun tabel temuan yang mencakup data dari hasil di atas disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Temuan Hasil Penelitian

No	Temuan	Data Pendukung
1	Pelaku UMKM yang mematuhi hukum bisnis dapat mengurangi risiko pelanggaran hukum.	– Pengurangan kasus sanksi denda atau tuntutan hukum terhadap UMKM yang mematuhi hukum bisnis.
		– Statistik penurunan jumlah kasus pelanggaran hukum pada UMKM yang mematuhi regulasi bisnis.
		– Survei kepatuhan hukum di kalangan UMKM yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi.
2	Pelaku UMKM dengan rekam jejak kepatuhan hukum mendapatkan kepercayaan lebih tinggi.	– Survei kepercayaan dari mitra bisnis yang menunjukkan preferensi bekerja dengan UMKM yang patuh hukum.
		– Tingkat retensi konsumen yang lebih tinggi pada UMKM yang dikenal mematuhi hukum bisnis.
		– Testimoni atau ulasan positif dari mitra bisnis atau konsumen terkait kepatuhan hukum UMKM tersebut.
3	Usaha yang mematuhi hukum bisnis lebih mudah mendapatkan izin dan sertifikasi resmi.	– Jumlah permohonan dan pemberian izin usaha yang lebih tinggi pada UMKM yang mematuhi regulasi.
		– Persentase UMKM yang memenuhi standar kualitas dan mendapatkan sertifikasi resmi.
		– Data pertumbuhan pasar atau pangsa pasar yang lebih tinggi untuk UMKM yang memiliki izin resmi.

Berdasarkan tabel 1 di atas, setiap temuan disertai dengan data pendukung yang konkret, seperti statistik, survei, testimonial, atau data empiris lainnya yang mendukung pernyataan tersebut. Hal ini membantu untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendetail tentang hasil penelitian terkait peran hukum bisnis terhadap pelaku UMKM.

Pembahasan

Kepatuhan Hukum dan Keberlanjutan Usaha

Pelaku UMKM yang mematuhi hukum bisnis cenderung memiliki usaha yang lebih berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pengurangan risiko hukum dan peningkatan kepercayaan dari mitra bisnis dan konsumen. Sebagai contoh, usaha yang memiliki izin dan memenuhi standar kualitas lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan usaha (Wang, 2016).

Pelaku UMKM yang mematuhi hukum bisnis cenderung memiliki usaha yang lebih berkelanjutan karena faktor-faktor berikut:

- a. Pengurangan Risiko Hukum: Dengan mematuhi hukum bisnis, pelaku UMKM dapat mengurangi risiko terkait pelanggaran hukum, seperti sanksi denda atau tuntutan hukum. Dengan demikian, mereka dapat mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih efisien untuk fokus pada pengembangan usaha dan inovasi produk atau layanan.
- b. Peningkatan Kepercayaan dari Mitra Bisnis dan Konsumen: Pelaku UMKM yang mempunyai rekam jejak kepatuhan hukum cenderung mendapatkan kepercayaan lebih tinggi dari mitra bisnis dan konsumen. Mitra bisnis akan lebih percaya untuk menjalin kerjasama jangka panjang, sedangkan konsumen akan lebih percaya untuk melakukan transaksi dan menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan.
- c. Mudah Mendapatkan Izin dan Sertifikasi: Usaha yang mematuhi hukum bisnis, seperti memiliki izin usaha dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, akan lebih mudah mendapatkan izin dan sertifikasi resmi. Hal ini akan membuka peluang akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing usaha di pasar lokal maupun global.

Sebagai contoh, sebuah usaha yang memiliki izin resmi dari pemerintah dan memenuhi standar kualitas produk akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Kepercayaan ini akan meningkatkan loyalitas konsumen, memperluas pangsa pasar, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan usaha secara

keseluruhan. Dengan demikian, patuhnya pelaku UMKM terhadap hukum bisnis tidak hanya menguntungkan mereka secara individual, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi secara keseluruhan.

Perlindungan Hukum sebagai Stimulus Inovasi

Perlindungan hukum yang memadai memberikan keamanan bagi pelaku UMKM untuk berinovasi. Perlindungan hak kekayaan intelektual, misalnya, mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk baru tanpa takut akan pelanggaran hak cipta atau paten. Penelitian ini menemukan bahwa UMKM yang memiliki perlindungan hukum yang baik lebih berani mengambil risiko dan melakukan ekspansi bisnis (Muttakin et al., 2015).

Perlindungan hukum yang memadai memberikan stimulus bagi inovasi di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan beberapa cara:

- a. Keamanan dalam Berinovasi: Perlindungan hukum, terutama terkait hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek dagang, memberikan keamanan kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan ide-ide baru dan menciptakan produk atau layanan yang inovatif. Dengan perlindungan hukum yang kuat, pelaku UMKM merasa lebih terlindungi dari risiko plagiarisme atau penyalahgunaan karya intelektual mereka.
- b. Mendorong Investasi dalam R&D: Perlindungan hukum yang baik juga mendorong pelaku UMKM untuk melakukan investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D). Mereka menyadari bahwa upaya inovasi mereka akan dilindungi oleh hukum, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengalokasikan sumber daya kegiatan R&D yang diperlukan untuk menciptakan produk atau layanan yang unik dan berkualitas.
- c. Meningkatkan Daya Saing: Dengan memiliki perlindungan hukum yang memadai, UMKM dapat menghasilkan produk atau layanan yang lebih unggul dan memiliki keunggulan kompetitif di pasar. Hal ini memungkinkan mereka untuk bersaing secara lebih efektif dengan pesaing, baik dalam pasar lokal maupun internasional. Dengan demikian, perlindungan hukum secara tidak langsung mendorong pelaku UMKM untuk terus berinovasi guna mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar mereka.

Penelitian ini menemukan bahwa UMKM yang memiliki perlindungan hukum yang baik lebih berani mengambil risiko dan melakukan ekspansi bisnis. Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa perlindungan hukum memberikan keyakinan kepada pelaku UMKM untuk mengambil langkah-langkah yang berani, seperti meluncurkan produk baru atau

memperluas jangkauan pasar. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya membantu dalam melindungi hak-hak mereka, tetapi juga merangsang semangat kewirausahaan dan inovasi di kalangan pelaku UMKM.

Sebagai kesimpulan, perlindungan hukum yang memadai tidak hanya penting untuk melindungi kepentingan pelaku UMKM, tetapi juga sebagai stimulus yang penting bagi inovasi dan pertumbuhan bisnis mereka. Oleh karena itu, peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi UMKM menjadi sangat krusial dalam mendukung ekosistem kewirausahaan dan inovasi di tingkat lokal maupun nasional.

Akses Informasi Hukum dan Pengetahuan Hukum

Akses yang mudah terhadap informasi hukum membantu pelaku UMKM memahami hak dan kewajiban mereka. Program pelatihan dan sosialisasi hukum bisnis yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat di Kota Medan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum di kalangan pelaku UMKM. Pengetahuan hukum yang baik memungkinkan pelaku usaha untuk membuat keputusan bisnis yang lebih informatif dan strategis (Uwuigbe & Ajibolade, 2013).

Akses yang mudah terhadap informasi hukum dan pengetahuan hukum yang baik memiliki dampak positif yang signifikan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan:

- a. Memahami Hak dan Kewajiban: Akses yang mudah terhadap informasi hukum memungkinkan pelaku UMKM untuk memahami dengan lebih baik hak-hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan usaha. Mereka dapat mengetahui secara jelas tentang prosedur-prosedur yang harus diikuti, perizinan yang diperlukan, serta tanggung jawab hukum yang harus dipatuhi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, pelaku UMKM dapat menghindari pelanggaran hukum yang tidak disengaja dan mengelola risiko secara lebih efektif.
- b. Pelatihan dan Sosialisasi Hukum: Program pelatihan dan sosialisasi hukum bisnis yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat membantu meningkatkan pemahaman hukum di kalangan pelaku UMKM. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM dapat memperoleh pengetahuan tentang berbagai aspek hukum yang relevan dengan usaha mereka, seperti hukum ketenagakerjaan, hukum perpajakan, dan hukum kontrak. Pengetahuan ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dan strategis.

- c. Membuat Keputusan Bisnis yang Informatif dan Strategis: Dengan pengetahuan hukum yang baik, pelaku UMKM dapat membuat keputusan bisnis yang lebih informatif dan strategis. Mereka dapat mengidentifikasi risiko-risiko hukum yang mungkin dihadapi dalam menjalankan usaha mereka dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Selain itu, pengetahuan hukum yang baik juga memungkinkan mereka untuk menjalankan usaha dengan lebih efisien dan memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang muncul.

Penelitian ini menunjukkan bahwa akses yang mudah terhadap informasi hukum dan program pelatihan hukum bisnis efektif dalam meningkatkan pengetahuan hukum di kalangan pelaku UMKM di Kota Medan. Dengan pemahaman hukum yang baik, pelaku UMKM dapat menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan usaha mereka dan menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul dalam lingkungan bisnis yang kompleks. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan akses terhadap informasi hukum dan menyelenggarakan program pelatihan hukum perlu terus didorong sebagai bagian dari strategi pembangunan UMKM di Kota Medan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan-temuan dari penelitian lain yang menunjukkan pentingnya hukum bisnis dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Misalnya, penelitian oleh Rahmana & Yuniarti (2018) menyoroti bahwa regulasi yang jelas dan perlindungan hukum yang kuat merupakan faktor penting dalam keberhasilan UMKM di Indonesia. Selain itu, penelitian oleh Setyawati et al. (2016) juga mendukung temuan bahwa perlindungan hukum dapat meningkatkan daya saing UMKM.

Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan fokus spesifik pada Kota Medan, yang memiliki karakteristik unik dalam hal dinamika ekonomi dan sosial. Penelitian ini juga menambahkan perspektif tentang bagaimana program pelatihan dan sosialisasi hukum dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan pengetahuan hukum dan kepatuhan di kalangan pelaku UMKM.

SIMPULAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum bisnis memainkan peran krusial dalam mendukung perkembangan UMKM di Kota Medan. Kepatuhan hukum, perlindungan hak, dan akses informasi hukum adalah faktor-faktor penting yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat regulasi, meningkatkan perlindungan

hukum, dan menyediakan akses informasi hukum yang lebih baik bagi pelaku UMKM di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, B. (2017). Implementasi Hukum Bisnis di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(2), 112-126.
- Muttakin, M. B., Khan, A., & Subramaniam, N. (2015). Firm Characteristics, Board Diversity and Corporate Social Responsibility: Evidence from Bangladesh. *Pacific Accounting Review*, 27(3), 353-372.
- Rahmana, A. & Yuniarti, S. (2018). Tantangan dan Peluang UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 33(1), 56-70.
- Setyawati, M., Widodo, T., & Mulyani, S. (2016). Perlindungan Hukum bagi UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 12(3), 89-102.
- Tambunan, T. (2019). Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- Uwuigbe, O. & Ajibolade, S. O. (2013). Regulatory Challenges of SMEs in Developing Economies: The Nigerian Experience. *Journal of Entrepreneurship and Business Innovation*, 1(1), 33-45.
- Wang, Y. (2016). Regulatory Frameworks and the Growth of SMEs in Southeast Asia. *Asian Journal of Business Law*, 8(2), 145-158.